

## Analisis Pengelolaan Sampah Kota di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Fitria Fatma<sup>1\*</sup>, Fatmawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Fort De Kock

\*E-mail Korespondensi: [fitriafatma1986@gmail.com](mailto:fitriafatma1986@gmail.com)<sup>1</sup>

---

### Info Artikel

**Masuk: 05 Juni 2021**

**Revisi: 05 Juni 2021**

**Diterima: 07 Juni 2021**

### Keywords:

Manajemen Pengelolaan Sampah

### Kata kunci:

Waste Manajemen

**P-ISSN: 2407 - 2664**

---

### Abstract

*Waste management in waste sorting is not carried out by the community as the main actor so that waste is mixed, waste collection at several TPS is mostly burned, stacked, dumped into rivers, transportation is carried out by officers on main roads and settlements, processing has been carried out and final processing of open dumping techniques is carried out in Tembilahan District. The qualitative research method is a descriptive approach, which is to describe phenomena systematically, as they are by looking at the components of input, process, and output. There were 6 informants, 1 community member, 1 head of DLHK, 1 head of waste management, 1 person for waste management, 1 sub-district head, and 1 operational officer selected by purposive sampling, data collection was Independent Interview. The results showed that the input of waste management management was not as maximal as expected due to limited funds, human resources and infrastructure, the sorting process was not carried out, waste collection to TPS was still low, transportation was partially served, processing had been carried out, final processing of open dumping techniques, and waste management output had not been completed. carried out as expected.*

---

### Abstrak

Manajemen pengelolaan sampah dalam pemilahan sampah tidak dilakukan masyarakat sebagai pelaku utama sehingga sampah tercampur, pengumpulan sampah di beberapa TPS kebanyakan dibakar, ditumpuk, dibuang ke dalam sungai, pengangkutan dilakukan petugas pada ruas jalan utama dan pemukiman, pengolahan pernah dilakukan dan pemrosesan akhir teknik open dumping yang dilakukan di Kecamatan Tembilahan. Metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif yaitu mendeskripsikan fenomena secara sistematis, apa adanya dengan melihat komponen input, proses, output. Informan berjumlah 6 orang 1 orang masyarakat, 1 orang kadis DLHK, 1 orang kabid pengelolaan sampah, 1 orang kasi penanganan sampah, 1 orang camat, dan 1 orang petugas operasional dipilih secara purposive sampling, pengumpulan data Interview Independent. Hasil penelitian menunjukkan input manajemen pengelolaan sampah belum semaksimal yang diharapkan karena keterbatasan dana, SDM dan sarana, proses pemilahan tidak dilakukan, pengumpulan sampah ke TPS masih rendah, pengangkutan terlayani sebagian, pengolahan sudah dilakukan, pemrosesan akhir teknik open dumping, dan output pengelolaan sampah belum terlaksana sesuai yang diharapkan.

## PENDAHULUAN

Menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu

yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang

berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi oleh negara-negara maju di dunia, termasuk Indonesia. Permasalahan sampah bukan lagi sekedar masalah kebersihan dan lingkungan saja, akan tetapi akan sudah menjadi masalah social yang berpotensi menimbulkan konflik (Riswan, Sunoko and Hadiyanto, 2015)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jenna R. Jambeck dari University of Georgia, pada tahun 2010 ada 275 juta ton sampah plastik yang dihasilkan di seluruh dunia. Sekitar 4,8-12,7 juta ton diantaranya terbuang dan mencemari laut (Global, 2010).

Berdasarkan survei penduduk antar sensus (Supas) 2015 jumlah penduduk Indonesia pada 2019 diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa. Menurut jenis kelamin, jumlah tersebut terdiri atas 134 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan. Indonesia saat ini sedang menikmati masa bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari usia tidak produktif, yakni lebih dari 68% dari total populasi (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, 2018)

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga perlu adanya pengelolaan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan, dan pembuangan akhir (Indonesia *et al.*, 2012)

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2011 pasal 23 tentang Penanganan Sampah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang meliputi pemilahan dalam bentuk pengelompokan, pengumpulan dalam bentuk pengambilan, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik komposisi dan jumlah, pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah secara aman.

Langkah yang diberikan pemerintah Indonesia sendiri sejauh ini dalam menghentikan laju pertumbuhan sampah adalah 1,15% yang terolah (di kompos dan di daur ulang) sedangkan selebihnya di buang di Tempat Pembuangan akhir (TPA) berjumlah sekitar 41,28%, di bakar 35,59%, dikubur 7,97%, dibuang sembarangan (ke sungai, saluran, jalan, dsb) 14,01% (BPS, 2017).

Berdasarkan data yang didapatkan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir 2019 jumlah pertumbuhan sampah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 sebanyak 105,446 Ton, 2018 sebanyak 106,784 Ton, 2019 sebanyak 108,139 Ton dengan hanya memiliki 1 TPA pada ibukota kabupaten dari 20 kecamatan didalamnya. Dan untuk Kecamatan Tembilihan jumlah sampah/hari sebanyak 38,568 kg dari total jumlah penduduk 78,161 jiwa.

Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir 2019, data 10 penyakit terbesar bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam kurun 3 tahun terakhir yaitu penyakit ISPA tahun 2017 (43.721), tahun 2018 (35.591) dan tahun 2019 (26.368). Penyakit Dermatitis dan Eksim tahun 2017 (10.997), tahun 2018 rawat jalan (8025), tahun 2019 (4302). Penyakit Diare tahun 2017 (10.599), tahun

2018 rawat inap (80) dan rawat jalan (9.904), tahun 2019 (6.307).

Berdasarkan fenomena yang ada dimasyarakat dilakukanlah observasi awal pada manajemen pengelolaan sampah di Kecamatan Tembilahan dan terlihat bahwa pemilahan sampah dilakukan oleh pemulung yang ada tidak dilakukan oleh masyarakat sebagai pelaku utama sehingga sampah yang mudah terurai dan tidak mudah terurai tercampur dalam mobil pengangkut sampah, pengumpulan sampah dari sumbernya belum maksimal diterapkan terutama sampah rumah tangga pengumpulan hanya dilakukan pada kawasan permukiman ditepi jalan besar, pasar-pasar dan tempat yang mudah di lalu mobil pengangkut sampah yang dikumpulkan warga dalam satu wadah berupa kantong plastik, tong sampah, TPS pasar, pengangkutan sampah TPS ke TPA dilakukan langsung oleh petugas kebersihan berjumlah 5 orang dalam satu unit mobil bak terbuka milik DLHK Kabupaten Indragiri Hilir pagi dan sore hari dan malam hari kemudian sampah tersebut di antar ke TPA di sungai beringin, pengolahan sampah pernah dilakukan oleh masyarakat yaitu bank sampah dan pengomposan tetapi sudah tidak berjalan lagi akibat, pemusnahan akhir/pemrosesan akhir sampah di Kecamatan Tembilahan masih menggunakan tehnik Open Dumping yang seharusnya sudah menggunakan tehnik Sanitary Landfill tetapi perencananya tahun 2020 akan dilakukan pemusnahan akhir dengan tehnik *Sanitary Landfill*.

Melihat dari fenomena dan observasi awal di Kecamatan Tembilahan belum tepatnya pengelolaan sampah disuatu daerah maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih jauh penyebab pengelolaan sampah dan mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul "Analisis Manajemen Pengelolaan Sampah

di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir"

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah penelitian kualitatif dengan tehnik *indept interview*. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir waktu penelitian selama 1 bulan di bulan Juni 2020. Pemilihan informant ditentukan dengan *purposive sampling* berjumlah 6 (enam) orang yaitu kepala dinas lingkungan hidup, kepala bidang pengelolaan sampah, kepala seksi penanganan sampah, camat tembilahan, petugas operasional sampah satu orang, dan masyarakat tembilahan satu orang. Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen input (perencanaa, sumber daya manusia, dana, kebijakan, dan sarana prasarana), komponen input (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemusnahan akhir sampah atau pembuangan), serta komponen output. Tehnik pengumpulan data secara tringulasi (wawancara, telaah dokumen, dan observasi).

## PEMBAHASAN

### Komponen Input

#### a. Perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa perencanaan sejauh ini bisa dikatakan sudah maksimal dari dinas perencanaan karena selalu dibuat setiap tahunnya dan ada target pengurangan dan penanganan sampah yang harus dicapai setiap tahunnya, Proses pembuatan rencana ini tentu sudah mengikuti kaidah dari manajemen perencanaan seperti menetapkan tugas dan tujuan, melakukan observasi dan analisa, menyiapkan beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi dan membuat sintesa dari semua kemungkinan dan memilih alternatif yang baik yang akan dipilih, perencanaan secara garis besar atau perencanaan induk dari tahun 2015- 2025 sesuai dengan ketentuan dimana pendekatannya menyusun rencana penangananan dan pengurangan sampah untuk menambah luas wilayah

pengangkutan di pemukiman agar terlayani seluruhnya. Perencanaan yang dibuat juga tidak terlepas dari kebijakan dan strategi yang ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2019.

Perencanaan yang dibuat pada tahun ini ada 3 program 1 program terdiri dari 3 kegiatan yang sifatnya stabilitas, rutin untuk menunjang sarana prasarana agar TPA yang ada sekarang ini bisa digunakan dalam jangka panjang karena kalau untuk membangun TPA baru mengganti sistem Open Dumping ke Sanitary Landfill belum bisa terealisasikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan UU No. 18 Tahun 2008 Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. (Sodikin, 2015).

Menurut asumsi peneliti, perencanaan yang dibuat sekarang ini berdasarkan kebijakan dan strategi yang telah disusun dalam hal ini pelaksanaan perencanaan induk dari tahun 2015-2018 dengan tujuan agar pendekatan pengurangan dan penanganan sampah terlaksana dan mencapai target yang diharapkan untuk tahun 2020 target pengurangan dan penanganan sampah terjadi peningkatan maka haruslah disusun pola penanganan sampah system konvensional (perwadahan, pengumpulan, pengangkutan, pembuangan akhir sampah) atau pengelolaan sampah berbasis komunitas yang bertujuan agar masyarakat kooperatif terhadap pengelolaan sampah. Penyebab masih rendahnya penanganan dan pengurangan sampah adalah pola pikir dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah tersebut hal ini juga disebabkan karena pengetahuan terhadap pola pengelolaan sampah masih rendah, kurangnya sosialisasi dan penyuluhan tentang masalah sampah kepada masyarakat menjadi kendala utama dalam pengurangan dan penanganan sampah di Kecamatan Tembilahan.

#### **b. Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa sumber daya manusia

secara garis besarnya belum memenuhi atau belum cukup dari segi kuantitas petugas angkut sedangkan untuk wilayah kecamatan tembilahan sendiri sudah maksimal. Petugas khusus angkutan ada yang bekerja 2 shift hal ini disebabkan masyarakat yang terkadang membuang sampah tidak tepat waktu sehingga sampah di TPS tetap menumpuk dan pada saat akan ada kegiatan kita sebagai petugas kebersihan harus mengambil sampah kembali walaupun di lokasi tadi sudah kita angkut hal ini terjadi karena personil angkut pengelolaan sampah tidak mencukupi selain itu tidak seimbangnya jumlah tenaga dinas dengan luas wilayah kerja, masih banyak yang belum terlayani baru sebagian yang terlayani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Dari 20 kecamatan yang terlayani hanya 2 kecamatan yang dilakukan pengangkutan itupun hanya di ruas jalan utama dan sebagian lorong pemukiman yang didekat pasar terapung dan kayu jati masyarakat masih membuang sampah kedalam sungai.

Hal ini dibuktikan dengan adanya sampah-sampah yang masih menumpuk di ruas jalan dan masih banyak TPS-TPS liar, tetapi kita tetap realistis dengan sumber daya kita yang tersedia sekarang bisa digunakan dengan efektif dan berdaya guna maksimal.

Menurut SNI 19-2454-2002 standrat SDM personil dump truck maksimum 3 orang perhari crew maksimum 3 dilengkapi dengan tutup terpal, personil armroll jumlah trip atau ritasi perhari minimum 5 dan jumlah crewmaksimum 1 orang, personil compactor truck jumlah trip atau ritasi perhari minimum 3 dan jumlah crew maksimum 2 orang dan taller truck jumlah trip dan ritasi perhari minimum 5 dan jumlah crew maksimum 2 orang (Vita, Purba and Candra, 2019).

Menurut asumsi peneliti, hubungan antara pelaksana pengelolaan sampah dan pemegang program pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tembilahan harus meningkatkan hubungannya dengan sesama pekerja dan lebih memperhatikan jumlah personil pengangkutan di wilayah tersebut agar dapat dicanangkan kembali perekrutan

personil pengangkutan yang baru karena kualitas pekerjaan bergantung pada kinerja pegawai dan dari jumlah personil yang ada, hal ini akan menambah jumlah angkutan yang tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dengan jumlah personil angkutan yang tidak sesuai dengan wilayah angkutan akan membuat personil merangkap ke pekerjaan lain atau harus bekerja double shift pada wilayah tertentu sehingga membuat kinerja menjadi menurun dan pengangkutan sampahpun menjadi rendah. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan personil untuk penambahan luas wilayah karena saat ini hanya terlayani sebagian dari 2 kecamatan yang dikelola dan dari 20 kecamatan di kabupaten Indragiri hilir yang dikelola DLHK, perlu adanya kebijakan dari pemerintah daerah dalam penambahan personil untuk pelayanan lapangan untuk menambah perluasan wilayah angkutan di 2 kecamatan yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan agar sampah yang terkumpul dan yang terangkut bertambah serta masyarakat terlayani kinerjapun pekerjaupun meningkat.

### **c. Dana**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa semua dana untuk pengelolaan sampah kecamatan tembilihan yang disediakan pemerintah ada. Tetapi belum cukup untuk mendanai pengelolaan sampah dana yang ada dari APBD sesuai dengan Perda Kabupaten Inhil No 20 tahun 2011 tentang penanganan sampah dana tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan organisasi, pengelolaan sampah sudah tergabung disini semua dan biaya yang lainnya seperti operasional pemeliharaannya, gaji petugasnya, karyawannya dan yang lainnya juga sudah disini semua. Untuk pengomposan dan bank sampah seharusnya dari pemerintah tapi dana yang ada tidak mencukupi untuk itu yang ada sekarang itu biaya pribadi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sifatnya mengarahkan saja untuk pengomposan dan Bank sampah.

Menurut Anthony (2006) anggaran atau dana yang baik harus melalui proses penyusunan anggaran dengan melibatkan

semua unsur-unsur perusahaan terutama komisi anggaran dan departemen anggaran serta fungsi-fungsi lainnya (Hartanto, 2006).

Menurut asumsi peneliti, dana yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang ada sekarang ini merupakan bentuk usaha mempertahankan program pengelolaan sampah di Kecamatan Tembilihan tetapi kalau untuk menambah jumlah luas wilayah angkutan sampah akan lebih baik jika pihak dari Dinas Lingkungan Hidup mengkoordinasikan dengan pemerintah yang mengurus dana dan tidak hanya itu jika dana kurang bisa dengan melakukan penyusunan proposal anggaran untuk aspek yang belum terpenuhi atau kerja sama dengan gotong royong yang mengikut sertakan masyarakat menggunakan dana swadaya dari masyarakat itu sendiri atau pengolahan sampah berbasis komunitas (masyarakat) dikembangkan dalam cluster (penanganan tingkat kelurahan) karekan masalah sampah merupakan tanggung jawab bersama DLHK hanya sebagai pengelola. Dana yang ada sekarang tidak dapat direalisasikan untuk mengubah TPA yang lama tehnik open dumping menjadi sanitary landfill, mendanai pengelolaan sampah menjadi sumber daya seperti Bank sampah dan pengelolaan pupuk organik sampah memerlukan keterlibatan dari pihak swasta dala mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kepada Dinas terkait agar mengkoordinasikan kepada Bupati untuk menganggarkan dana untuk pengelolaan sampah bukan hanya mengeluarkan kebijakan tetapi tidak melakukan pemantauan dan pembinaan serta menganggarkan untuk menggerakkan, mengendalikan pengelolaan<sup>123</sup> sampah ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, makanya pengelolaan sampah tetap saja tidak mencapai target pengurangan dan penanganan sampah.

### **d. Kebijakan**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kebijakan yang menjadi acuan bagi DLHK selain dari Undang-Undang No 18 Tahun 2008 juga menjadikan acuan Peraturan

Bupati Indragiri Hilir Nomor 65 tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Perbup ini sudah di laksanakan dan di terapkan dari tahun 2018 sampai sekarang dan inilah hasilnya dengan ketersediaan spras dan SDM sekarang hanya sebagian yang terlayani untuk mencapai target pengurangan sampah pun masih banyak kendala yang terjadi seperti dana, spras, tenaga kerja, dan tantangan terbesar kita itu masyarakat kita disini masih banyak yang membuang sampah sembarangan, membuang sampah setelah sampah diangkut petugas, memindah-mindahkan tempat sampah karna alasan bau, tempatnya jadi jorok, bau busuk dan merusak keindahan.

Menurut suharno (2011) kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarahkan pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri (Pengelolaan and Perkotaan, 2011).

Menurut asumsi peneliti, pemerintah daerah bukan hanya sekedar mengeluarkan kebijakan dan menjadikan acuan tetapi juga menganggarkan dan melakukan pengawasan pengelolaan sampah agar proses dalam pengolahan sampah dikecamatan bisa dilaksanakan dengan baik, sekarang saja jika SDM terpenuhi tetapi sprasnya tidak sesuai standar dengan kebijakan yang ditetapkan juga tidak menjadi pendukung utama dalam pengurangan serta penanganan sampah, karena pengelolaan sampah seharusnya dilakukan dari rumah mulai dari pemilahan dan pengumpulan untuk pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan akhir memang sekarang itulah yang dilakukan petugas dari Dinas tetapi jika dari masyarakat saja tidak memilah bagaimana mau melakukan pengolahan sementara sampah tercampur dalam satu wadah di TPS diangkut dengan menggunakan armada dump truck, armroll truck dan kendaraan roda tiga.

Harapan kedepannya agar pemerintah lebih memperhatikan mengenai

penanganan sampah, penyiapan dana, pembangunan TPA termasuk penyiapan alat berat, penyiapan dan pelatihan pengelola sangat perlu dilakukan sebagai pendukung kebijakan yang telah dijalankan karena jika sampah tidak dilakukan pengurangan dan penanganan maka TPA yang berlokasi di Jl.Beringin tidak akan bisa digunakan dalam waktu jangka panjang mengingat pertambahan jumlah sampah dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah penduduk dikecamatan tembilihan.

#### **e. Sarana dan Prasarana**

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa sarana prasarana yang disediakan saat ini untuk operasional diwilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir belum mencukupi. Sarana berupa bak armroll, kendaraan roda tiga, TPS dalam bentuk tong sampah, mobil pengangkut sampah belum memadai untuk pengelolaan sampah. Untuk wilayah kerja kecamatan tembilihan memiliki dua pasar dan satu pasar dikecamatan tembilihan hulu untuk itu bak armroll hanya ada di pasar terapung sementara di pasar pagi dan pasar kayu jati belum ada bak armroll sementara di pasar terapung belum bisa menampung sampah dari pasar terapung karena jumlahnya hanya 1 unit. Keadaan mobil dan sarana lain masih kategori aman digunakan hanya jumlah SDM dan sarana prasarana yang kurang untuk wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Sarana prasarana kecamatan tembilihan sudah terlayani sebagian yang berada dipinggiran jalan utama dan lorong-lorong yang berada di pinggir sungai masih membuang sampah ke dalam sungai karena container bak armroll baru ada 1 unit.

Menurut Periansa (2019) sarana prasarana yang baik perlu beberapa pertimbangan seperti tujuan penggunaan sarana prasarana, menentukan sarana prasarana yang sesuai, tingkat kegunaan sarana prasarana, spesifikasi sarana prasarana, biaya sarana prasarana, fitur keamanan, fleksibilitas sarana prasarana, kemudahan penggunaan sarana prasarana, kecepatan operasional sarana prasarana, dan masukan dari operator sarana

prasarana (Winahyu, Hartoyo and Syaukat, 2019).

Menurut peneliti, penyediaan sarana prasarana harus disediakan oleh pemerintah daerah agar sampah yang ada di wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Kecamatan Tembilahan dapat dilakukan pengelolaan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Kalau tidak ada sarana dan prasarana tentulah masyarakat masih membuang sampah ke dalam sungai dan membuat TPS liar serta akan dilakukan pembakaran oleh masyarakat karena tidak diangkut oleh petugas angkut sampah hal ini akibat TPS liar tersebut tidak berada pada ruas jalan utama, protokol maupun lorong-lorong yang bisa dilalui kendaraan roda tiga.

## **2. Komponen Proses**

### **a. Pemilahan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pemilahan belum dilakukan oleh masyarakat wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta belum ada memberlakukan menempatkan antara sampah organik dan anorganik yang ada di masyarakat kecuali institusi, kantor-kantor dan lain sebagainya karena memang tong tersebut milik pribadi dan beberapa instansi bukan dari instansi pengelola. Sekarang ini semua sampah yang dari masyarakat sebagian besar dimasukkan dalam kantong plastik kemudian dibuang ke TPS didepan lorong atau ruas jalan ada juga masyarakat yang tidak terjangkau oleh petugas angkut membakar sampah didepan rumah dan untuk pedagang di pasar terapung akan membuang sampahnya ke dalam sungai tanpa ada nya pemilahan. Hal ini dilakukan oleh petugas pasar dan juga pedagang itu sendiri. Belum ada wadah tersendiri yang disediakan oleh dinas karena juga anggaran untuk itu belum mencukupi sampai kesitu, artinya kan kalau menyediakan wadah tersendiri ada sampah organik anorganik nah untuk kecamatan kita yang dikelola hanya berbentuk drum yang di potong menjadi dua bagian sebagai TPS yang diletakkan di taman, trotoar, dan wilayah-wilayah tertentu yang sudah ditetapkan oleh DLHK.

Menurut Undang-Undang Nomor 81 tahun 2012 pemilahan sampah dilakukan melalui kegiatan pengelompokan jenis sampah yang terdiri dari sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang dapat terurai, sampah yang dapat digunakan kembali dan sampah yang dapat didaur ulang (Global, 2010).

Menurut asumsi peneliti, pemilahan sampah bisa dilakukan sosialisasi penyadaran masyarakat dengan menerapkan kepada masing-masing keluarga harus memiliki minimal 2 buah wadah yaitu satu wadah untuk sampah organik dan satunya lagi untuk sampah anorganik dan pembentukan kader penyuluhan sampah serta pelatihan sudah harus dibuatkan program lanjutan hal ini bertujuan agar pemilahan sampah sudah dimulai dari sumber sampah dan mempermudah proses lebih lanjut di tempat pengolahan sampah. Sebenarnya pelatihan masyarakat sebagai upaya menumbuhkan dorongan dan support yang luar biasa terutama dari dirinya sendiri dan menyediakan sampah komunal yang terdiri dari tiga jenis yaitu sampah organik berwarna hijau, sampah anorganik berwarna kuning dan bahan bakar berbahaya berwarna merah atau bisa juga diganti dengan drum yang terdiri dari tiga potong yang diberikan tanda di setiap jenis sampah yang diletakkan di ruas jalan, taman, pasar dan tempat lainnya yang berkemungkinan ramai masyarakat. Wadah yang sudah terpisah akan mempermudah petugas dalam melakukan pemilahan sampah lanjutan dan akan menjadikan daya tarik agar masyarakat mau dan mampu memisahkan sampah mulai dari rumah dan lingkungan sekitarnya.

### **b. Pengumpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengumpulan yang dilakukan masyarakat Kecamatan Tembilahan tidak mengarah pada pengolahan sampah untuk didaur ulang dan pengomposan. Sampah yang buang ke TPS tidak sesuai dengan jenis sampah semuanya digabung dan dibuang ke dalam tong

sampah. Kegiatan pengumpulan sampah untuk dilakukan pengolahan belum bisa dilaksanakan dengan baik. Pengumpulan sampah dilakukan oleh masyarakat ke TPS-TPS terdekat dan ada juga yang dijemput oleh petugas angkutan di lorong yang bisa dilalui oleh kendaraan roda tiga kemudian dimasukkan ke dalam dump truck untuk di bawa ke TPA, untuk penyapuan jalan biasanya diangkut kelokasi untuk diangkut ke TPA menggunakan kendaraan roda tiga. Sebagian besar masyarakat tidak peduli dengan pengumpulan sampah tersebut, ada yang dengan cara membakar untuk mengurangi sampah jenis rumah tangga tentu hal ini akan menimbulkan pencemaran udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar kecamatan tembilihan.

Berdasarkan pasal 9 yang terdapat pada Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 tahun 2016 tentang pembinaan, pengawasan dan penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat yang menyatakan bahwa setiap orang harus membuang sampah pada tempat sampah yang telah di sediakan dan setiap orang dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman kota, parit, saluran atau drainase, danau dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan (Sodikin, 2015).

Menurut asumsi peneliti, masyarakat tidak melakukan pengumpulan karena tidak adanya sosialisasi yang diterima langsung oleh pemerintah setempat apa lagi secara berkelanjutan sesuai dengan pengumpulan pembuangan sampah dan jenis sampah sebagian masyarakat pemukiman apalagi yang tidak bekerja biasa menumpuk didepan rumah dan membakar, dan untuk kebanyakan yang bekerja tidak membuang sampah sesuai dengan jenisnya sudah menjadi budaya ditambah dana yang ada tidak mencukupi untuk mengadakan TPS sesuai standar kesehatan. Seharusnya pemerintah setempat yang diberi tanggung jawab setiap lorong membentuk kelembagaan untuk masyarakat agar peran serta masyarakat meningkat.

### **c. Pengangkutan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengangkutan sampah dilakukan pada ruas jalan utama atau lokasi dekat protokol, penyapuan jalan serta lorong-lorong pemukiman yang bisa dilalui kendaraan roda tiga. Kegiatan pengangkutan dilakukan pada ruas jalan utama tiga sift dan satu sampai dua sift di pemukiman atau lorong-lorong yang bisa dilalui kendaraan roda tiga, tenaga pengangkut tergantung dari survey sampah yang ada di TPS tersebut. Pengangkutan untuk perumahan ada yang pagi ada yang sore dari jam 07.00-11.00 wib dan untuk jadwal siang jam 13.00-16.00 wib, ada juga yang 3 sift itu yang di jalan-jalan besar itu dari pagi jam 06.00- 11.00 wib ada siang 13.00-16.00 wib ada malam jam 19.00-23.00 wib masing-masing 4 jam pengangkutan sampah. Kebanyakan sampah yang berada di TPS sudah diangkut petugas tetapi masih ada sampah yang menumpuk akibat masih banyaknya masyarakat membuang sampah tidak pada waktu pengangkutan tetapi bagi petugas sepanjang itu masih merupakan jalur angkutan tetap diangkut oleh petugas. Mobil angkutan yang digunakan masih menggunakan bak terbuka karena ketersediaan sarana prasarana hanya memiliki 4 unit drump truck, 2 unit armroll truck dan 5 unit kendaraan roda tiga.

Menurut (Wahyono, 2017, p. 113) pengangkutan sampah dilakukan dari sumber sampah ketempat penampungan sementara (TPS). Pengangkutan secara teratur dan berkala akan mencegah penumpukan sampah disekitar wadah. Di TPS sampah diangkut secara berkala ke TPA pengangkutan sampah dari TPS ke TPA menggunakan truk sampah (Putra, 2012).

Menurut asumsi peneliti, penggunaan dump tuck dan armroll sebagai sarana pengangkutan sampah sudah tepat, hanya saja masih banyaknya sampah yang berserakan diluar container yang disebabkan masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai dengan ketentuan jadwal pembuangan sampah dan tidak memasukkan sampah kedalam container hanya di letakkan diluar container sehingga membuat pekerjaan petugas menjadi lambat. Dan jika dari masyarakat kecamatan

tidak ikut terlibat disetiap kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dalam proses pengelolaan sampah untuk tahun berikutnya akan tetap seperti tahun sebelumnya.

#### **d. Pengolahan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa masyarakat kecamatan tembilihan sudah melakukan pengolahan tetapi belum maksimal karena baru memiliki 1 unit bank sampah sementara pengomposan belum ada. Sampah sisa-sisa pasar, perkantoran maupun sampah jenis sampah rumah tangga sebagian besar dibakar, ditumpuk dan di buang kedalam sungai dan di buang ke TPA tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu, untuk wilayah kerja DLHK pembuatan pupuk organik ada lokasinya di kecamatan kempas sampai sekarang masih bejalan harapan kami dengan berjalannya pembuatan pupuk kompos itu bisa dimanfaatkan betul-betul oleh kelompok tani dan bisa disebarakan untuk petani lain sebenarnya untuk mereka sendiri kita hanya mengarahkan saja. Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat di kecamatan tembilihan oleh camat dan kelurahan hanya bersifat pengumuman dimasjid, spanduk, dan baleho. Camat dan kelurahan sebagai perpanjangan tangan Dinas Lingkungan Hidup tidak melakukan pembinaan kepada masyarakat secara langsung hanya berbentuk informasi tidak langsung. Kebiasaan masyarakat yang masih belum mengolah sampah sebelum dibuang ke TPS akan mempersulit pekerjaan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah ditambah ketersediaan sarana prasarana yang tidak didukung oleh dana yang mencukupi dari pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 terlaksananya pengelelolaan yang baik adalah meningkatnya kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya (Artiningsih dkk, 2012).

Menurut asumsi pemerintah harus menyusun ulang program pendaur ulangan sampah skala pemukiman, pelatihan kader atau penyuluh pengolahan sampah berbasis

masyarakat maupun komunitas menjadi barang bermanfaat dan berguna tentunya harus didukung dengan sarana parsarana khusus wadah yang menampung untuk mengolah sampah menjadi barang bermanfaat dan berguna. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat dapat merubah pola pikir dan tradisi membakar, membuang sampah sembarang tempat, dan bagi sampah dipasar pedagang tidak membuang sampah ke dalam sungai. Diharapkan juga kepada perpanjangan tangan Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan pembinaan dan pelatihan secara langsung kepada masyarakat agar tau dan mampu melakukan pengolahan tidak hanya diserahkan dalam bentuk sampah yang tercampur dalam satu wadah berakhir di TPS.

#### **f. Pemusnahan atau Pemrosesan Akhir**

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil observasi TPA yang berlokasi di JL. Beringin Kecamatan Tembilihan masih menggunakan sistem Open Dumping belum Sanitary Landfill lahan untuk sanitary lanfill sebenarnya sudah ada tetapi jika dikaitkan dengan dana untuk mengubah ke sanitary landfill membutuhkan dana yang tinggi dan dana tersebut belum ada kendala lainnya yang pertama daerah kita ini rawan, kedua permukaan air tanah kita ini kan nekan membutuhkan tanah uruh diratakan memang agak sulit merubah dari open dumping ke sanitary landfill memang juga faktor biaya yang sampai puluhan milyar itupun baru fisiknya saja belum operasionalnya rasanya PEMDA belum mampulah tapi kita berharap karena Undang-Undang No 18 Tahun 2008 mengharuskan TPA itu harus sanitary landfill dan memang sudah diharuskan karena keterbatasan dana tersebut pihak dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan hanya mengelola sampah mulai dari pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir dari TPS ke TPA.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Djatmiko Winahyu (2013) yang mengatakan bahwa untuk mengubah tehknik pemrosesan akhir atau pemusnahan akhir dari Open Dumping ke sanitary landfill

membutuhkan strategi anggaran yang tinggi dan kerjasama beberapa kelembangaan, kerja sama antar daerah dan perbaikan teknologi dibidang persampahan perlu ditingkatkan (Zulkarnaini and Saam, 2009).

Menurut asumsi peneliti, untuk menjadikan TPA Beringin ke tehnik Sanitary landfill belum bisa dilakukan karena membutuhkan dana yang cukup besar dan kerja sama beberapa lembaga, antar daerah, penggunaan teknologi dan faktor internal maupun faktor eksternal kegiatan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan usaha mempertahankan pengelolaan sampah di Kecamatan Tembilihan dengan menambah perluasan jalur angkutan sampah di lorong-lorong agar masyarakat dapat terlayani dengan keberadaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Sebelum mewujudkan pemusnahan akhir sampah teknik open dumping ke teknik sanitary landfill pihak yang bertanggung jawab mengenai pengelolaan sampah dan yang mengeluarkan kebijakan harus mempersiapkan terlebih dahulu bahaya dan risiko yang mungkin terjadi kedepannya apabila pemusnahan akhir sampah di ubah menjadi sanitary landfill.

### **3. Komponen Output**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa yang didapatkan pengelolaan sampah di Kecamatan Tembilihan dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 20 Tahun 2011 sudah diterapkan dari tahun 2015-2020 tetapi belum terlaksana dengan baik artinya belum maksimal sesuai dengan harapan. Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sudah melakukan manajemen pengelolaan sampah dengan baik, hanya komponen pendukung manajemen belum memadai dalam input seperti sumberdaya manusia, dana dan spras dan untuk pengelolaan komponen proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan akhir sampah secara keseluruhan sudah diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta partisipasi masyarakat sehingga belum terlaksana dengan baik sesuai dengan

kebijakan Perbup, Perda dan Undang-Undang.

Pengelolaan sampah yang dilakukan petugas dan staf DLHK tidaklah mampu mengelola sampah secara keseluruhan apabila masyarakat tidak ikut serta dalam pengelolaan sampah karena masalah sampah merupakan masalah bagi lingkungan sekitar terutama sampah jenis rumah tangga yang volumenya setiap tahun terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, jadi dengan melibatkan masyarakat sumber daya manusia yang masih minim di DLHK akan terbantu oleh masyarakat. Oleh karena itu DLHK dan sektor terkait seperti kecamatan dan kelurahan lebih aktif membina masyarakat agar lebih proaktif dalam menjaga lingkungan sekitar, membuang sampah di TPS yang telah disediakan oleh DLHK dan membantu program kerja dinas.

### **SIMPULAN**

1. Komponen Input
  - a. Perencanaan belum tercapai  $\leq 30\%$ .
  - b. Sumber Daya Manusia sudah mencukupi dari segi kuantitas, hanya personil pengangkutan sampah yang kurang.
  - c. Dana pengelolaan sampah belum mencukupi seluruh kegiatan pengelolaan persampahan.
  - d. Kebijakan yang ada belum dapat diterapkan secara maksimal, karena beberapa hambatan yang ada di komponen input dan proses.
  - e. Sarana dan prasarana sudah cukup memadai untuk mendukung kegiatan personil persampahan.
2. Komponen Proses
  - a. Pemilahan Sampah belum terlaksana secara maksimal, karena rendahnya partisipasi masyarakat.
  - b. Pengumpulan sampah ke TPS sudah dilaksanakan, tetapi tidak sesuai dengan jenis sampah.
  - c. Pengangkutan yang dilakukan petugas dari TPS ke TPA sudah terlaksana dengan baik.

- d. Pengolahan sampah belum maksimal karena hanya memiliki 1 unit bank sampah di kecamatan.
  - e. Pemusnahan sampah masih menggunakan metode open dumping.
3. Komponen Output
- Pelaksanaan pengelolaan sampah belum sepenuhnya sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2008 dengan beberapa hambatan, salah satu sumber daya manusia, dana, dan metode pemusnahan akhir sampah.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini sangat banyak peran dari institusi Bagi Dinas Lingkungan Hidup yang berantusias memberikan informasi dan menunjukkan seluruh kegiatan di lapangan. Selain itu, Badan Penyelenggara Program Pengelola Sampah di Kecamatan Tembilihan serta Masyarakat ikut serta jalannya penelitian ini, sehingga informasi yang didapatkan sangat maksimal.

### REFERENCES

Artiningsih dkk, A. (2012) 'Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga', *Serat Acitya*, 1(2), p. 107. Available at: <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/29>.

Global, P. (2010) 'Analisis potensi reduksi sampah pada tps tlogomas kota malang sebagai upaya mengurangi pemanasan global', pp. 0-1.

Hartanto, W. (2006) 'Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Gombong Kabupaten Kebumen', *Universitas Diponegoro*, 1, pp. 24-29.

Indonesia, U. *et al.* (2012) 'Penentuan lokasi pembangkit listrik tenaga sampah di kabupaten indragiri hilir riau skripsi'.

Pengelolaan, A. and Perkotaan, P. (2011) 'ANALISIS PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PERKOTAAN (Studi kasus pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala)', *Smartek*, 9, pp. 155-172.

Putra, H. T. (2012) 'Kebijakan Tentang Pengelolaan Sampah', p. 155.

Riswan, Sunoko, H. R. and Hadiyanto, A. (2015) 'Kesadaran Lingkungan', *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 9(1), pp. 31-39. Available at: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmulingkungan/article/view/2085>.

Sodikin, S. (2015) 'Arahan Dan Manajemen Pengangkutan Sampah Di Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi', *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2(1), pp. 50-57. doi: 10.15408/sd.v2i1.1410.

Vita, C., Purba, G. and Candra, L. (2019) 'TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018 Based on data from the Office of the Environment and cleanliness of Indragiri', 2(1), pp. 1-8.

Winahyu, D., Hartoyo, S. and Syaukat, Y. (2019) 'Strategi Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang, Bekasi', *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 5(2), pp. 1-17. doi: 10.29244/jurnal\_mpd.v5i2.24626.

Zulkarnaini and Saam, Z. (2009) 'Faktor-faktor Penentu Tingkat Partisipasi Pedagang dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru', 3(1), p. 11.